



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL WIDIASTUTI
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
3. NHK : 673757

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.345.000.000

1. Tanah Seluas 893 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
2. Bangunan Seluas 30 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
3. Bangunan Seluas 30 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Bangunan Seluas 44 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
5. Bangunan Seluas 21 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA ,
HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
6. Tanah Seluas 290 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m²/31 m² di KAB / KOTA KOTA
BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 142 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA
SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 682.200.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA/V Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000



2.	LAINNYA, POLYGON SEPEDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp.	
	200.000	
3.	MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp.	
	2.000.000	
4.	MOBIL, TOYOTA COROLLA CROSS Tahun 2022, HASIL SENDIRI	
	Rp. 500.000.000	
C.	HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp. 54.790.000
D.	SURAT BERHARGA	Rp. ---
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp. 1.357.220.571
F.	HARTA LAINNYA	Rp. 163.435.812
Sub Total		Rp. 8.602.646.383
III. HUTANG		Rp. 2.784.975.639
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp. 5.817.670.744

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.